

## ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the contestation of publicness values by three actors (government, business and hybrid organizations) in the management of a clean Brantas River Basin. The specific objectives of this study are to understand the relationship of interests between actors, namely government, business and hybrid organizations. Furthermore, to understand the resistance movement carried out by hybrid organizations against efforts to prevent and handle environmental damage in the Brantas River. The method used in this study is qualitative with a phenomenological approach. The results of this study are that these three actors have their respective roles and responsibilities in environmental mitigation, but the government often supports business interests more than the public. ECOTON, which emerged as a reaction to environmental damage, functions as a representative of public interests and seeks to fight against business dominance. The specific findings of this study are 1) ECOTON was born without government intervention as an independent response to the environmental crisis in the Brantas River Basin, focusing on public interests. 2) The government failed to carry out its duties in the public interest, often arguing for limited authority according to law. 3) The government prioritizes business interests by opening up wide space for industrialization in the Brantas River Basin, defeating public interests. 4) The conflict between the government and ECOTON regarding authority and responsibility was successfully resolved through post-case negotiation No. 177/PDT/2023/PTSBY. ECOTON used this negotiation to maintain publicness in the contestation between actors.

**Keywords:** Publicness, Government, Business and Hybrid Organization

## INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kontestasi nilai-nilai kepublikan oleh tiga aktor (pemerintah, bisnis, dan organisasi hibrida) dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas yang bersih. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk memahami hubungan kepentingan antar aktor, yaitu pemerintah, bisnis, dan organisasi hibrida. Selanjutnya, untuk memahami gerakan resistensi yang dilakukan oleh organisasi hibrida terhadap upaya pencegahan dan penanganan kerusakan lingkungan di Sungai Brantas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian ini adalah bahwa ketiga aktor tersebut memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam mitigasi lingkungan, namun pemerintah sering kali lebih memihak pada kepentingan bisnis daripada publik. ECOTON yang muncul sebagai reaksi terhadap kerusakan lingkungan berfungsi sebagai representasi kepentingan publik dan berupaya melawan dominasi bisnis. Temuan khusus penelitian ini adalah 1) ECOTON lahir tanpa campur tangan pemerintah sebagai respon independen terhadap krisis lingkungan di Daerah Aliran Sungai Brantas, dengan fokus pada kepentingan publik. 2) Pemerintah gagal menjalankan tugasnya untuk kepentingan publik, sering kali berdalih kewenangannya terbatas menurut undang-undang. 3) Pemerintah mengutamakan kepentingan bisnis dengan membuka ruang yang luas untuk industrialisasi di Daerah Aliran Sungai Brantas, sehingga mengalahkan kepentingan publik. 4) Konflik antara pemerintah dan ECOTON terkait kewenangan dan tanggung jawab berhasil diselesaikan melalui negosiasi pasca perkara No. 177/PDT/2023/PTSBY. ECOTON menggunakan negosiasi ini untuk menjaga keterbukaan publik dalam kontestasi antar aktor.

**Kata Kunci:** Keterbukaan Publik, Pemerintah, Bisnis dan Organisasi Hibrida